DAFTAR ISI

JURNAL SIDANG MPR-RI

EDITORIAL **Hal.**

- Selamat Datang Anggota MPR RI 2009-2014..... 2.

LAPORAN UTAMA

- Bursa Ketua MPR ..... 3.
- Anggota DPD Bisa Jadi Ketua MPR..... 3.
- Ekor Putusan MK, Peta Dukungan Berubah..... 4.

LIPUTAN

- Gladi Bersih Calon Anggota MPR, DPR dan DPD..... 5.
- Bursa Calon Ketua DPR & MPR Ketua MPRHarus Faham..... 6.
- PDIP Siapkan Tiga Kandidat untuk Wakil Ketua DPR..... 7.
- Kinerja MPR RI Periode 2004-2009..... 8.
- Profil DPR RI 2009-2014..... 9.
- Primus Yustisio: Menjadi Anggota DPR Bukan Anugrah Tapi Musibah..... 10.
- Marzuki Ali, Sosok Pekerja Keras Bagi Masyarakat..... 11.

SERBA SERBI

- Kesibukan Siti Nurbaya Bakar..... 12.
- Pameran Foto Kinerja MPR..... 13.
- Stand Mustika Ratu dan Air Mancur diserbu Penggemar Jamu..... 14.

TOKOH HARI INI

- Roy Suryo Lakukan Interupsi Perdana..... 15.

- **Rancangan Acara Sidang MPR Awal Masa Jabatan.....**
- **Agenda Acara DPD.....**
- **Daftar Nama Anggota MPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014**

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI, **PENANGGUNG JAWAB** DR. C. Rahimullah, SH., M.Si, **PEMIMPIN UMUM** Drs. Eddie Siregar, M.Si **PEMIMPIN REDAKSI** M. Rizal, **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Yana Indrawan **REDAKTUR PELAKSANA** Elis Murniaty, Suratno **KOORDINATOR REPORTASE** Rharas Esthining Palupi, Adriansyah, **REDAKTUR FOTO** Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto **REPORTER** Euis Karmilah, Budi Muliawan, Rosando, Sopiah, Tengku Novan Muda Mulya, Tri Hastuti, Rudi M. Gultom, Jaka Sindu, Anggi Widia P, Suwarni, Bayu Setiadi, Suci Ati, Muammil Rokhily, Sugeng Irianto, Nita Juwita, Dian Arivani **FOTOGRAFER** Ari Soeprapto, Sugeng, Teddy Agusman, Wira, Eka Hindra Sasmita, Supardy, Iwan, Agung Sulistiono **PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI** Syamsul Bahri **KOORDINATOR DISTRIBUSI** Elly Triani **STAF DISTRIBUSI** Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani **SEKRETARIS REDAKSI** Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih, Fatmawati, Yenita Revi **TIM AHLI** Syahril Chili, Johni Yasrul, M. Husen, Rini S. Danudjaja, Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto, Iman Firdaus, Derry Irawan, Mustafa Helmy, Budi Sucahyono, Nurul Huda, Mauludi Rachman, Rianzi Gautama. **ALAMAT REDAKSI** Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, JakartaTelp. (021) 57895050, 57895051, 57895237, 57895238 Fax. (021) 57895051, 57895237

Selamat Datang Anggota MPR RI 2009-2014

Tanggal 1 Oktober 2009 ini, bangsa dan rakyat Indonesia menyaksikan di televisi atau mendengar dari radio, sebanyak 688, tidak termasuk Papua, anggota MPR Periode 2009-2014 mengucapkan sumpah. Mereka mengucapkan sumpah di hari pertama sebagai anggota MPR untuk komitmen dan setia memperjuangkan nasib rakyat, bangsa, negara, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pengucapan sumpah ini bukan sebuah seremonial semata, namun sebuah peristiwa yang serius, sebab di atas kepala mereka ada kitab suci agama masing-masing mereka, sehingga bila mereka selama menjadi anggota MPR, sejak tanggal 1 Oktober hingga 5 tahun ke depan tidak sesuai dengan apa yang disumpahkan, urusan mereka tidak hanya kepada konstituennya tetapi juga dengan Tuhan. Oleh sebab itu, wahai anggota MPR ucapkan sumpah dengan hati jangan cuma sampai di bibir saja.

Belajar dari pengalaman pengucapan sumpah anggota MPR, pada periode-periode sebelumnya, seolah-olah pengucapan sumpah hanya sebagai kegiatan yang seremonial belaka. Apa yang diucapkan seakan-akan tidak menjadi beban atau amanah yang harus diembannya sehingga selepas acara itu banyak anggota MPR yang melanggar atau menyimpang dari apa yang disumpahkan. Oleh sebab itu, wahai anggota MPR yang baru, tepati apa yang kau ucapkan.

Hadirnya anggota MPR yang baru ini juga memberi harapan baru bagi rakyat. Dilihat dari tingkat pendidikan dan usia, mereka lebih gres dan pinter, dibanding dengan periode sebelumnya. Anggota MPR dari unsur DPR saja misalnya terlihat, 66% berusia di bawah 50 tahun. Dari segi pendidikan 50% berpendidikan sarjana (S-1), 41% berpendidikan pascasarjana (S-2/S-3), dan kurang dari 10% berpendidikan SLTA atau diploma.

Tidak hanya gres dan pinter saja. Para anggota MPR dari unsur DPR, misalnya. Diantara mereka banyak yang cantik, ganteng, dan lucu. Ya, benar mereka adalah para selebritis. Kehadiran mereka setidak-tidaknya memberi kesejukan. Siapa yang tidak senang melihat Vena Melinda, Rachel Maryam, Angelina Sondakh, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Okky Asokawati, Adji Massaid, Eko Patrio, Primus Yustisiyo, Tantowi Yahya, Nova Rianti Yusuf, Deddy Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, hadir dalam setiap rapat atau sidang-sidang di Senayan. Meski banyak yang meragukan kapasitas mereka, namun kita harus *positif thingking*.

Anggota MPR dari unsur DPD pun demikian. Kapasitas, ketenaran, dan tingkat pendidikannya pun tidak perlu dikhawatirkan. Mereka adalah tokoh-tokoh daerah bahkan banyak yang berdarah biru, ada yang ratu, sultan, anak gubernur, istri pejabat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, anggota MPR Periode 2009-2014, bisa dikatakan bukan orang-orang sembarangan, mereka adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh rakyat secara langsung di daerahnya masing-masing.

Nah, bila rakyat secara kualitas sudah percaya kepada mereka, sekarang tinggal bagaimana mereka menjaga kepercayaan itu. Sebagai anggota MPR mereka harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sesuai dengan kewenangannya MPR yang dimiliki, mereka tetap bisa memperjuangkan aspirasi itu. Caranya? Dengan mengusulkan perlunya amandemen UUD.

Amandemen yang sudah terjadi keempat kalinya itu ternyata telah memberi tempat kepada rakyat untuk berpartisipasi lebih dalam demokratisasi, *check and balances*, kesejahteraan sosial, dan HAM. Dengan adanya amandemen rakyat bisa memilih langsung siapa presiden yang disukai. Dengan adanya amandemen rakyat bisa melakukan judicial review terhadap UU. Dengan adanya amandemen HAM bisa tegak, dan dengan amandemen anggaran pendidikan bisa mencapai 20%.

Sebagai bangsa dan rakyat Indonesia tentu kita ingin menuju perubahan: dari hari ke hari semakin baik. Untuk itu anggota MPR harus jeli agar amandemen yang diusulkan benar-benar untuk melakukan perubahan yang lebih baik, namun harus dilandasi untuk kepentingan bersama dan tidak berjangka pendek (AW).

Bursa Ketua MPR
Siapa Berpeluang Menjadi Ketua MPR?

Jurnal MPR (1/10). Putusan uji materiil terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) hari Rabu (30/09) kemarin, yang membuka peluang bagi anggota DPD menjadi Ketua MPR semakin menyemarakkan bursa calon Ketua MPR dan mengubah peta perebutan kursi Ketua MPR.

Nama-nama calon ketua MPR yang telah muncul antara lain Taufik Kiemas (PDI Perjuangan), Hidayat Nur Wahid (PKS), Hajriyanto Y. Thohari (Partai Golkar), dan akan bertambah bila DPD mengajukan calon tersendiri. Nama Ginandjar Kartasasmita disebut-sebut sebagai calon dari DPD.

Kepada *Jurnal Sidang MPR*, Hajriyanto Y. Thohari memastikan tidak akan maju sebagai calon Ketua MPR. Menurut politisi Partai Golkar ini, partai berlambang beringin itu justru tidak ingin merebut posisi sebagai Ketua MPR. "Kita hanya ingin masuk dalam jajaran pimpinan MPR," katanya ketika diwawancarai Rabu kemarin.

Menurut Hajriyanto, Partai Golkar menghargai partai-partai lain yang sudah melakukan kerja politik dan sudah mengajukan calon-calonnya. "Ini bukan soal tertarik atau tidak tertarik dengan posisi sebagai Ketua MPR. Namun, di politik, ada tata krama atau fatsun politik," katanya.

Tata krama yang dimaksud adalah penghargaan kepada partai lain yang telah melakukan kerja-kerja politik dan sudah mengajukan nama-nama. "Kita tidak mungkin menelikung di persimpangan jalan. Kalau memang mau merebut posisi ketua MPR, seharusnya dari awal," katanya lagi.

Arah Partai Golkar dalam pemilihan Ketua MPR nanti, lanjut Hajriyanto, sedang dibahas dan dinegosiasikan DPP Partai Golkar dengan partai lain. Melihat hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, negosiasi juga akan dilakukan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). "Bagaimana keputusan Partai Golkar tergantung pada hasil negosiasi tersebut," ujarnya.

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berkeyakinan Hidayat Nur Wahid akan terpilih lagi menjadi Ketua MPR. "Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah menyatakan senang kalau Pak Hidayat menjadi Ketua MPR. Ada kontrak hitam di atas putih," kata Fahri Hamzah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (30/9).

Menurut Fahri, di tubuh Partai Demokrat, apa yang dikatakan SBY itulah yang diikuti. "Pemilihan ketua MPR tergantung SBY. Di Demokrat cuma SBY saja yang didengar," katanya. Dia mengatakan, secara realitas politik, PDI Perjuangan menjadi "musuh" Demokrat dan SBY pada pemilihan presiden.

Namun, Ketua Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menegaskan bahwa Demokrat akan mengusung Taufik Kiemas dari PDI-P sebagai calon Ketua MPR, sedangkan wakilnya berasal dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara dua calon lagi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Ini didukung Golkar, PPP, Demokrat dan PDI-P sendiri. PKB dan PKS mudah-mudahan ikut kami juga," tutur Syarif di Gedung DPR RI, Rabu (30/9). Syarif mengaku bahwa memang belum ada komunikasi formal dengan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai. Namun, Syarif mengaku cukup yakin dengan pernyataannya tadi.

Pernyataan Syarif Hasan sejalan dengan Sekjen PAN, Zulkifli Hasan. "Kita sudah bahas dengan koalisi dan sepakat mendukung Pak Taufik Kiemas. Sudah ada arahan dari Partai Demokrat," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Zulkifli Hasan mengungkapkan, sudah ada pertemuan antara PD dengan partai koalisi pada Selasa malam (29/9). Dalam pertemuan itu, Ketua FPD Syarif Hasan memberikan arahan. "Kita sudah bicara dengan ketua FPD dan sepakat mendukung Pak Taufik Kiemas. PAN, PPP, dan PD sudah bulat," kata Zulkifli Hasan. (Nurul Huda/Budi Sucahyo/Derry)

Anggota DPD Bisa Jadi Ketua MPR

Jurnal MPR (1/10). Ini kabar gembira bagi anggota DPD periode 2009-2014. Kini mereka memiliki hak dan posisi yang sama dengan anggota DPR untuk memperebutkan kursi Ketua MPR. Putusan uji materiil terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang bagi anggota DPD menjadi Ketua MPR.

MK memutuskan permohonan uji materiil pasal yang mengatur Ketua MPR berasal dari anggota DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. **"Mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan," kata Ketua MK, Mahfud MD, membacakan putusan di Gedung Mahkamah, Jakarta, Rabu (30/9).**

MK menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 sepanjang menyangkut frasa "yang berasal dari anggota DPR" dan frasa "yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD", serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD.

Mahkamah menyatakan, frasa "ditetapkan" dalam Pasal 14 ayat 1 itu harus dimaknai sebagai "dipilih." Artinya, pemilihan pimpinan MPR didasarkan pada mekanisme Rapat Pleno MPR secara terbuka, tanpa memandang status sebagai anggota DPR atau DPD.

Permohonan uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini diajukan oleh

lima anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih pada periode 2009-2014. Mereka adalah Intsiawati Ayus (Riau), Marhany Victor Poly Pua (Sulawesi Utara), Sofyan Yahya (Jawa Barat), Sri Kadarwati (Kalimatan Barat), dan Wahidin Ismail (Papua Barat).

Mereka mempermasalahkan Pasal 14 Ayat 1 UU yang berbunyi, "Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR".

Oleh para pemohon, pasal tersebut dinilai tidak adil dan tidak memberikan kesetaraan bagi anggota DPD untuk menjadi ketua MPR. Karena, pasal ini hanya memungkinkan ketua MPR dipilih dari anggota yang berasal dari unsur anggota DPR saja, sedangkan anggota dari unsur DPD tidak dapat dipilih sebagai ketua MPR.

MPR merupakan lembaga yang beranggotakan anggota DPR dan DPD. Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari lima orang. Satu Ketua MPR berasal dari anggota DPR, sedangkan empat lainnya adalah Wakil Ketua MPR yang berasal dari dua anggota DPR dan dua anggota DPD.

Berdasarkan UU lama, pimpinan MPR terdiri atas empat orang, di mana satu ketua dan tiga wakil ketua. Juga tak ada aturan Ketua MPR haruslah berasal dari unsur anggota DPR.(Budi Sucahyo)

Ekor Putusan MK, Peta Dukungan Berubah

Jurnal MPR (1/10). Munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketua MPR menjadi semakin menyemarakkan bursa calon ketua. Calon pun bisa bertambah banyak dan akan menjadikan peta dukungan. Tentu saja hal ini akan berpengaruh dalam bursa calon ketua umum hari ini. Putusan MK itu membatalkan pasal 14 ayat 1 UU 27/ 2009 tentang aturan yang menetapkan bahwa Ketua MPR berasal dari DPR. Dengan demikian, jabatan ketua MPR tak harus datang dari unsur DPR. Tapi, bisa saja dari unsur DPD.

"Keluarnya putusan MK ini menjadikan peta pertarungan bursa ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lebih menarik. Calonnya pun akan bertambah. Kalau selama ini yang muncul nama-nama seperti Hidayat Nur Wahid maupun Taufik Kiemas, maka akan muncul nama baru seperti Ginandjar Kartasasmita. Menurut saya ini perkembangan yang bagus," ungkap ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salang.

Menurut Salang, keputusan MK tersebut menjadikan pemilihan ketua MPR kali ini lebih transparan dan hasilnya akuntabel. Hal ini juga menunjukkan bahwa aturan yang tidak adil akan ditolak MK. Ditambahkannya, dikabulkannya permohonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut juga akan berpengaruh terhadap koalisi partai yang mendukung para kandidat yang ada. "Ada beberapa hal menarik. Pertama, DPD akan solid jika calonnya satu. Kalau dua calon meraka bisa rame sendiri. Kedua, mempengaruhi peta koalisi partai. Ketiga, calon yang ada mempunyai peluang yang sama dan kesulitan yang sama juga," jelasnya.

Menurutnya, menjadi ketua MPR saat ini masih menjadi prestasi dan prestise bagi partai politik. Untuk itu ke depan MPR lebih bisa menunjukkan kontribusinya yang nyata terhadap rakyat. (Nurul Huda)

DR. A.M. Fatwa: Keputusan MK harus Dilaksanakan

Jurnal MPR (1/10). Ditemui usai Rapat Tim Perumus Materi Tata Tertib DPD di Nusantara V, Dr. A.M. Fatwa memberikan komentar tentang keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan DPD untuk *Judicial review* UU Nomor 27 Tahun 2009.

Menurut kandidat ketua DPD ini, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang bersifat final dan akan membuka ruang yang lebih 'cair' kembali antara DPR dan DPD tentang kontroversi susunan pimpinan MPR RI, hari Rabu (30/09) kemarin.

"Membuka ruang bagi DPR dan DPD agar bisa sama-sama lagi dan bisa berulang berpasang-pasangan dalam struktur pimpinan," ujar mantan wakil ketua MPR 2004-2009 ini.

Lebih jauh lagi Fatwa menepis anggapan bahwa DPR agak "arogan". Menurutnya, satu atau semua keputusan politik itu pasti punya alasan yang kuat."Jadi menurut, saya keputusan MK itu harus dilaksanakan saja, tidak bisa di komentari lagi. Ini kan untuk kepentingan bersama," jelas Fatwa. (Derry Irawan)

Gladi Bersih Calon Anggota MPR, DPR dan DPD

Jurnal MPR (1/10). Sebagian besar dari 688 anggota MPR periode 2009-2014 – yang terdiri 560 anggota DPR dan 128 anggota DPD – Rabu (30/9) mengikuti gladi bersih Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR, DPR dan DPD RI.

Tampak hadir dalam acara yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR Senayan itu antara lain, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Sesjen MPR Rahimullah, Sesjen DPR Nining Indra Saleh dan Sesjen DPD Siti Nurbaya.

Acara geladi bersih yang diikuti anggota legislatif hasil pemilu legislatif 2009 ini cukup menarik. Bukan hanya untuk anggota leslatif yang baru, melainkan juga para wartawan dari berbagai media, baik cetak mau pun elektronik.

Para wartawan agaknya tak mau kehilangan momen penting untuk acara lima tahunan ini. Apalagi, diantara anggota legislatif itu terdapat sejumlah selebriti, seperti Eko Patrio, Okki Asokawati, Primus Yustisio, Rike Diah Pitaloka, Vena Melinda, Dedi "Miing" Gumelar. Serta anggota legislatif dari kalangan aktivis, tampak antara lain: Puan Maharani, Budiman Sudjatmiko dan Pius Lustrilanang.

Selain itu, para wartawan juga memburu politikus yang akhir-akhir ini santer diberitakan akan menduduki posisi sebagai ketua DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, salah seorang diantara Marzukie Alie, calon Ketua DPR RI dari Partai Demokrat, partai pemenang pemilu.

Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dimulai dari anggota DPR dengan menampilkan lima peraga yang mewakili agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Untuk agama Islam berdiri dengan tanda biru tua, Kristen warna pink, Katolik warna orange, Hindu warna biru muda, dan agama Budha warna ungu.

Pelaksanaan gladi bersih Sumpah/Janji untuk anggota DPR RI berjalan lancar, dan setelah itu dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah/Janji anggota DPD RI, dan terakhir Pengucapan Sumpah/Janji anggota MPR RI.

Gladi bersih pagi itu dilaksanakan sebanyak dua kali. Menurut Sesjen DPR RI Nining Indra Saleh, gladi bersih pertama dengan skenario lengkap dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, dan gladi bersih kedua tanpa dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika Presiden tidak hadir. Karena sampai sekarang (kemarin, *red*) belum ada keterangan resmi apakah Presiden bisa hadir atau tidak, mengingat Presiden masih di luar negeri, menghadiri Sidang G-20 di Amerika Serikat.

Malam sebelumnya, para anggota MPR, DPR dan DPD ini melakukan doa bersama untuk kelancaran jalannya pelaksanaan pelantikan Anggota MPR/DPR dan DPD RI.

"Persiapan untuk pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD esok (hari ini, red) berjalan dengan baik, termasuk urusan keamanan. Mudah-mudahan saat hari H semuanya dapat berjalan lancar," harap Nining Indra Saleh.

Selain Presiden dan Wakil Presiden, acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR dan DPD RI juga akan dihadiri para Duta Besar, Ketua KPU dan undangan lainnya.(Tuti, bs)

Bursa Calon Ketua DPR & MPR
Ketua MPR Harus Faham NKRI

Jurnal MPR (1/10). Bursa calon Ketua MPR RI dan DPR RI periode 2009-2014 jadi isu menarik menjelang pelantikan anggota dewan baru. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Menneg PDT) yang sekaligus Anggota DPR 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ir. H. Muhamad Lukman Edy, M.Si punya kriteria sendiri terhadap sosok Ketua MPR nanti.

"Kriteria Ketua MPR bagi kita, dia harus orang yang total memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu penting. Karena, Pimpinan MPR itu sebagai pengawal NKRI. Jadi, integritas pimpinan MPR harus terjamin, merah putihnya NKRI seperti apa, wawasan nusantaranya seperti apa," kata Lukman saat ditemui seusai Gladi Bersih Pelantikan Anggota DPR, DPD dan MPR 2009-20014 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Hingga kini, menurut Lukman, PKB belum menentukan sikap akan ikut paket mana. "Nanti kan ada pemilihan berdasarkan paket-paket yang ditawarkan. Siapa melawan siapa. PKB sedang menyiapkan akan ikut dalam paketnya siapa. Nanti akan kita umumkan," jelas Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Bagaiman pendapat Anda tentang figur Taufik Kiemas sebagai calon Ketua MPR? Menjawab pertanyaan ini, Lukman menyatakan, dari segi kapasitas, suami Megawati Soekarnoputri itu cukup memenuhi kriteria. "Kita paham lah gimana *track record*-nya. Di samping pernah menjadi bapak negara, kalau dilihat dari segi kriteria yang saya sampaikan tadi tak terbantahkan," ujarnya.

Yang penting, lanjut Lukman, seperti apa dukungan dari lintas fraksinya untuk Taufik Kiemas. "PKB sendiri sampai sekarang (kemarin, red) belum bersikap apakah akan ikut mendukung Pak Taufik Kimas sebagai ketua MPR," kata Lukman.

Meski banyak kritikan tertuju ke Taufik bahwa selama jadi anggota DPR 2004-2009, politisi senior dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) sering mangkir dari rapat-rapat atau sidang. "Kita memahami dia memerankan peran lain. Yang itu tetap dalam kerangka mendukung tugas-tugas teman-teman dari PDIP," ungkap Lukman.

Ketua DPR Sebaiknya Ada Pilihan

Sementara itu, soal pencalonan Ketua DPR telah ditetapkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru mengatur bahwa Ketua DPR merupakan anggota DPR yang berasal dari partai yang memperoleh kursi terbantak pertama di DPR. Anggota DPR 2009-2014 dari Partai Gerindra Abdul Wahid berpendapat, karena memang aturan UU seperti itu, otomatis harus menerima. Tetapi ia mengusulkan kalau bisa dari partai pemenang tersebut (Partai Demokrat) sebaiknya tidak hanya menentukan satu nama saja," kata Abdul Wahid.

Menurut Abdul Wahid, paling tidak ada tiga nama atau empat nama, sehingga kita bisa memilih. Toh, beliau-beliau itu nantinya yang akan duduk jadi ketua kita. "Tapi kalau hanya ditentukan satu nama kita seperti dipaksakan untuk menerima dia jadi ketua,"ungkap Wahid yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) II Jawa Tengah ini.

Sejauh yang terdengar di teman-teman anggota dewan baru, lanjut Wahid, saat ini hanya ada satu nama yang ditawarkan oleh Partai Demokrat, yaitu Marzuki Ali. "Dulunya kan sempat muncul nama Anas Urbaningrum, tapi katanya Anas diplot menjadi Ketua Fraksi," ujarnya.

Secara pribadi, Wahid menilai tak ada masalah dengan figur Marzuki Ali. "Kita *no problem*. Anas juga baik. Marzuki juga baik," tegasnya. Sebagai anggota dewan baru, Wahid menilai keberadaan MPR masih diperlukan sebagai wadah penggabungan DPR dan DPD.

Anggota dewan 2009-2014 dari Partai Hanura, Faisal Akbar menyatakan hal yang sana. Ia menilai, sesuai dengan aturan main, Ketua DPR berasal dari partai terbesar, yaitu Partai Demokrat bisa diterima. "Karena merupakan kesepakatan bersama dan itu adalah sebuah konsekuensi, ya sudah kita ikuti," katanya sesuai Gladi Bersih.

Soal nantinya Partai Demokrat mengajukan hanya satu nama atau dua nama terserah internal Partai Demokrat. "Mereka mau mengajukan satu nama, dua nama atau berapapun silahkan saja. Tapi otoritasnya ada di partai mereka," demikian Faisal Akbar.(Rini S. Danudjaja).

Hajriyanto Tohari, Tokoh Muda Siap Pimpin MPR

Perjalanan Hajriyanto Tohari sebagai salah seorang calon Ketua MPR periode 2009-2014 tidaklah mudah. Hajriyanto terlebih harus bersaing ketat dengan para politisi senior di tubuh Partai Golkar.

Proses voting dalam rapat Partai Golkar di Sekretariat DPP Partai Gokar, cukup mendebarkan. Akhirnya Hajriyanto meraih 46 suara mengalahkan Burhanuddin Napitupulu yang meraih 42 suara. Dengan demikian, Hajriyanto ditetapkan menjadi calon pimpinan MPR dari Partai Golkar.

Pria kelahiran Karang Anyar, Jawa Tengah, 26 Juni 1960, ini memang dikenal kritis dan cukup menonjol di lingkungan DPR/MPR. Kemampuan analisa dan kematangan dalam menyampaikan pesan dan gagasan saat membicarakan masalah krusial dengan pemerintah membuat dirinya banyak dikejar para kuli tinta untuk dimintai pendapatnya.

Ayah dari empat orang anak ini mengaku, untuk menjadi Pimpinan MPR sarat akan kompetisi politik yang membutuhkan komunikasi dengan partai lain. "Pimpinan Golkar akan terus melakukan penjajakan dengan partai lain," kata mantan dosen UI ini.

Dia mengatakan, partai lain juga telah melakukan sosialisasi dengan partai yang ada guna menggolkan kadernya. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan Hidayat Nur Wahid dan PDI Perjuangan yang mencalonkan Taufik Kiemas, sedangkan Partai Golkar baru sekarang menentukan calonnya.

Ketika ditanya apakah Partai Golkar terlambat menentukan pilihannya, Hajriyanto mengatakan, Partai Golkar belum terlambat dalam menentukan calonnya. "Kita sangat menghargai kerja partai politik yang telah mengajukan kadernya menjadi calon Ketua MPR," paparnya.(si)

PDIP SIAPKAN TIGA KANDIDAT UNTUK WAKIL KETUA DPR

Jurnal MPR (1/10). Tokoh muda PDIP Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, partainya menyiapkan tiga kandidat untuk menduduki Wakil Ketua DPR periode 2009-2014. Ketiga calon tersebut adalah Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Tjahyo Kumolo dan tokoh senior Panda Nababan.

Menjawab pertanyaan wartawan sesuai mengikuti acara Gladi Resik Pelantikan anggota DPR di Gedung Nusantara Kompleks Gedung MPR/DPR Senayan, Rabu (30/9), politisi yang mantan aktivis ini mengatakan, ketiga kandidat Pimpinan DPR ini masih akan dirapatkan di tingkat DPP. "Dalam rapat nanti keputusan untuk menentukan calon Wakil Ketua DPR diambil dengan musyawarah, bukan melalui pemungutan suara," katanya.

Lima calon yang diduga kuat untuk menduduki kursi Pimpinan DPR yang ramai disebut akhir-akhir ini adalah Ketua Marzuki Alie dari Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif disusul empat wakil ketua dari peraih empat besar pileg berikutnya, yakni: Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar, Pramono Anung (PDIP), Anis Mata dari PKS dan Marwoto Mitrohardjono dari PAN.

Ketika didesak, siapa kandidat yang berpeluang diputuskan untuk maju sebagai Pimpinan Dewan, ia mengelak sebab masih akan diputuskan rapat DPP. Keputusan ini lanjut Budiman, karena PDIP belum menentukan targetnya apakah akan beroposisi atau mendukung pemerintah. "Jadi menurut saya, wakil Ketua DPR dari PDIP tergantung dari posisi politik yang akan diambil oleh partai," jelas dia.

Menurut mantan tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang amat vocal terhadap pemerintahan orde baru ini, kalau untuk oposisi, barangkali Panda Nababan vokal, itu meyakinkan, mungkin kalau berkoalisi, bisa Pramono Anung yang dimajukan. "Ini pandangan pribadi saya," tegasnya.

Lebih lanjut Budiman mengatakan, apakah PDIP akan beroposisi atau koalisi hingga kini belum diputuskan. "Masih belum selesai, yang jelas sebelum 20 Oktober atau saat pelantikan Presiden," katanya.

Saat ditanyakan, bagaimana peluang terkuat apakah oposisi atau koalisi, dia tetap memilih beroposisi. "Pandangan pribadi saya, karena kemarin bersaing dalam Pilpres dan PDIP gagal, ada baiknya beroposisi," ungkapnya dengan menambahkan karena Megawati dalam persaingan Pilpres gagal, nampaknya lebih baik berada di luar pemerintahan.

Mengenai adanya pandangan di kalangan PDIP bahwa saat menjadi oposisi dianggap tidak lancar dalam pengabdian kepada rakyat atau ada hambatan serta dicurigai, Budiman mengatakan, meskipun hambatan itu mungkin salah, baginya bukan dihambat lalu mundur. Justru diubah hambatan itu karena kita di era reformasi. "Secara pribadi, ada baiknya PDIP beroposisi karena kalah bertarung dalam pilpres dan sebaiknya berada di luar pemerintahan," tutur Budiman menambahkan.(mp,tt,et).

Budiman Sudjatmiko
Ingin Duduk di Komisi Politik Dalam Negeri

Calon Anggota DPR RI dari F-PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan ingin duduk di komisi membidangi politik dalam negeri, pertahanan dan pemilu. Ia mengungkapkan hal itu di sela-sela gladi bersih acara Pelantikan Anggota DPR / MPR Periode 2009-2014 di Gedung Nusantara, Rabu (30/9).

"Saya *concern* pada bidang pemerintahan dalam negeri. Tentunya ingin di Komisi II," anggota DPR/ MPR dari Dapil Jawa Tengah VIII itu. Namun, bila dalam perkembangannya, ia tidak duduk di komisi yang dimaksud, Budiman juga telah menyiapkan diri untuk berkiprah di komisi lainnya.

"Kalau tidak duduk di Komisi II, mudah-mudahan bisa duduk di Komisi I," ujarnya. Komisi I pada DPR Periode 2004-2009 membidangi pertahanan, politik luar negeri, komunikasi serta informatika dan intelijen.

Sekarang ini adalah untuk periode kedua Budiman Sudjamiko duduk sebagai anggota DPR/MPR. Sebelum terjun menjadi Anggota DPR, Budiman dikenal sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat. (bs)

I Gusti Putu Artha-Wakil Ketua KPU
Pembekalan Untuk Penyamaan Visi

Berbicara tentang pembekalan yang dilakukan KPU terhadap para anggota legislatif periode 2009-2014 dirasa perlu untuk penyamaan visi dan persepsi dalam menyambut tugas-tugas kelegislatifan. "Jadi memang kita (KPU) berikan orientasi dalam bentuk forum dialog dari Mahkamah Konstitusi, KPK, untuk penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Tahun 2004 kan tidak pernah terjadi. Akibatnya persoalan-persoalan anggota legislatif banyak yang masuk penjara, kasus korupsi, termasuk perselisihan hasil Pemilu," ujar Putu Artha.

Putu Artha menegaskan bahwa para anggota legislatif datang dari berbagai daerah, berbagai kepentingan, berbagai partai politik, agar ada penyamaan persepsi tentang tugas-tugas lembaga negara lain. "Respon mereka mengikuti pembekalan ini sangat positif, malahan inginnya lebih panjang lagi dengan durasi materi yang lebih beragam, saya rasa semacam di-*charge*-lah para anggota legislatif ini.

"Karena begitu mereka masuk ke DPR langsung bisa *on* bekerja," kata Putu Artha.

Masih menurut Putu Artha, partai-partai juga mengadakan semacam pembekalan, tetapi sangat teknis dan sifatnya sangat politis, jadi perlu penyempurnaan dari negara."

Ketika ditanyakan soal kualitas anggota legislatif saat ini. Putu Artha dengan tersenyum menjawab, tunggu lima tahun lagi. (Derry Irawan)

Special Dialogue Metro TV

Kinerja MPR RI Periode 2004 - 2009

Jurnal MPR (1/10). Apa saja yang sudah dilakukan MPR Periode 2004-2009? Kemarin siang tepat pukul 10.30 hingga 11.00 WIB, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengupas masalah itu di Metro TV dalam program *Special Dialogue*. Dialogue dipandu presenter Deti Supandi mengupas kinerja dan dinamika MPR di bawah pimpinan Hidayat.

Di bawah pimpinan Amien Rais, kata Deti, MPR mampu mengamandemen UUD 1945 dalam 4 tahap, lalu apa keberhasilan MPR di bawah pimpinan Hidayat? Dengan tenang Hidayat menjelaskan bahwa keberhasilan MPR Periode 2004-2009 adalah menuntaskan apa yang sudah dilakukan oleh MPR pada periode sebelumnya.

"Banyak yang mempermasalah tentang sah tidaknya amandemen UUD, namun setelah kita masukkan dalam lembaran negara, maka polemik soal sah dan tidaknya telah selesai," ujar Hidayat Nur Wahid.

Tidak hanya itu, soal proses amandemen atau perubahan UUD dalam 4 tahap itu juga telah dibukukan dalam Risalah Perubahan sebanyak 20 jilid. MPR yang oleh undang-undang diberi amanat untuk melakukan sosialisasi, juga telah menjalankan amanat itu dengan tuntas, seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia sudah pernah dikunjungi oleh Tim Sosialisasi yang dibentuk dan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota MPR.

Dalam hal sosialisasi, MPR mempunyai tim yang beranggotakan 70 orang yang berasal dari unsur DPR dan DPD. Tim ini dibagi dalam dua bagian, yakni: tim yang bertugas mensosialisasikan UUD dan tim yang mensosialisasikan Tap MPR. Keberadaan tim sosialisasi itu dikuatkan oleh Inpres 2005.

"Seluruh anggota tim adalah anggota MPR yang terlibat dalam proses amandemen, sehingga memahami betul proses amandemen itu," jelas Hidayat.

Sosialisasi dilaksanakan dengan beragam cara. "Yang pasti bukan indoktrinasi," papar Hidayat. Sosialisasi ini diberikan kepada seluruh departemen, Mabes TNI/Polri, Ormas, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya, lewat pertemuan langsung atau melalui RRI dan TVRI.

Bagi generasi muda ada sosialisasi yang membikin mereka *enjoy* dan *fun*, yakni melalui cerdas cermat. "Jangan dilihat pada cerdas cermatnya tetapi bagaimana metodenya sehingga proses sosialisasi berjalan secara efektif," tutur Hidayat.

Untuk lebih menguatkan sosialisasi dan pemahaman akan arti penting konstitusi, maka MPR pada periode ini mengusulkan adanya Hari Konstitusi. Syukur usulan itu diterima oleh Presiden SBY sehingga Hari Konstitusi ditetapkan pada 18 Agustus sesuai dengan Keppres No. 18 Tahun 2008. "Jadi, kini kita tidak hanya mempunyai Hari Ibu, Hari Pahlawan, namun juga mempunyai Hari Konstitusi," ujar Hidayat.

Bila lembaga negara tinggi lain biasanya terkena berbagai macam kasus KKN, pimpinan MPR periode ini lepas dari fitnah dan tuduhan itu. Buktinya BPK memberi penghargaan sertifikat dengan katagori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan MPR. "Ini merupakan penghargaan tertinggi dan pertama yang diberikan kepada lembaga tinggi negara," katanya.

Intinya UUD sudah dilakukan amandemen, tetapi banyak rakyat tidak merasakan perubahan itu. "Apa sih yang sudah dirasakan rakyat dari amandemen itu?" tanya Deti. : "Banyak," jawan Hidayat, seraya merinci keberhasilan itu, seperti: pemilihan presiden langsung, memilih anggota DPD, jabatan presiden yang dibatasi selama 2 kali, anggaran pendidikan 20% dan masalah HAM yang tercantun dalam UUD, bentuk NKRI yang tidak bisa diubah, dan terbentuknya lembaga tinggi baru seperti MK dan KY.

"Dengan adanya amandemen itu, rakyat bisa terlibat secara langsung dalam proses demokratisasi," paparnya.

Diakui oleh Hidayat, MPR di bawah kepemimpinannya sebenarnya ada keinginan untuk melakukan amandemen kelima, namun sayang dari *deadline* pengajuan pada tanggal 7 Agustus 2007, persyaratan untuk bisa melakukan amandemen tidak terpenuhi. Ternyata, persyaratan sepertiga jumlah anggota MPR tidak terpenuhi. Semestinya diajukan oleh 226 dari 550 dari 678 anggota MPR, tapi tercapai 216 suara atau kurang 10 suara.

Bagi Hidayat, UUD bukan sebuah kitab suci yang tidak bisa diubah, namun juga bukan sesuatu yang mudah untuk diubah. "Mengubah UUD bukan seperti membikin karedok," katanya. Untuk mengubahnya diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 37 Ayat 1 dan 2.(Ardi Winangun)

Profil DPR RI 2009-2014 Muda dan Berpendidikan Lebih Baik

Jurnal MPR (1/10). Hari ini, Mahkamah Agung memandu untuk mengucapkan sumpah/janji terhadap 560 anggota DPR RI periode 2009-2014 di Gedung Nusantara, MPR/DPR RI. Ada yang lain dari "penghuni" baru gedung wakil rakyat. Hasil kajian Litbang Harian *Kompas* terhadap 650 anggota legislatif kali ini– menunjukkan, sebanyak 65,1% merupakan wajah baru. Dari aspek identitas, kualitas anggota dewan kali ini lebih baik daripada periode sebelumnya.

Ada empat aspek pembeda sosok anggota legislatif baru dengan anggota legislatif sebelumnya. Pertama, dari sisi pendidikan, sosok yang muncul sekarang ini menampilkan potensi kualitas pendidikan lebih tinggi. Terbukti, lebih dari 90% anggota dewan merupakan lulusan perguruan tinggi, yaitu 49,5% berpendidikan sarjana (S1) dan 41,1% berpendidikan pascasarjana (S2).

Bandingkan dengan dua periode sebelumnya. Pada 2004-2009, jumlah lulusan pergurun tinggi mencapai 82,7% dengan rincian 49,1% lulusan S1 dan 33,6% S2. Sedangkan jumlah lulusan perguruan tinggi periode 1999-2004 sebesar 74,9% dengan rincian 56,3% lulusan S1 dan hanya 18,6% lulusan S2.

"Artinya jelas sekali bahwa dari segi identitas pendidikan, bekal atau potensi yang mereka miliki jadi lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum-sebelumnya," kata Peneliti Utama Litbang *Kompas* Bestian Nainggolan, beberapa waktu lalu.

Dari sisi usia, sosok anggota dewan 2009-2014 relatif lebih muda. Tak diragukan lagi, lebih dari 60% anggota dewan baru berusia di bawah 50 tahun. Dengan rincian 63,2% berusia 25-50 tahun dan 0,7% berusia kurang dari 25 tahun. Hal ini menunjukkan kondisi terbalik bila dibandingkan dua periode sebelumnya, dimana anggota dewan berusia di atas 50 tahun lebih dominan. Pada 2004-2009 misalnya, prosentase anggota dewan berusia di bawah 50 tahun hanya 49,4%. Dan, jumlah kecil lagi terjadi pada 1999-2004 yaitu 42,5%.

"Kita bisa lihat makin lama usia anggota dewan makin muda. Kita berharap mereka lebih produktif bila dibanding dengan usia di atas 50 tahun. Karena secara fisik sangat potensial, yaitu lebih enerjik," jelas Bestian.

Dari sisi pekerjaan, sebagian besar atau 56,7% berangkat dari latar belakang swasta, seperti kalangan profesi, wiraswasta dan karyawan swasta. Sektor tersebut identik dengan kalangan independen. Hanya 34,9% atau 1/3 dari jumlah anggota DPR merupakan kalangan yang sebelumnya tercatat sebagai anggota legislatif, baik DPR, DPD maupun DPRD. "Dibandingkan periode sebelumnya, proporsi mereka menyusut sekalipun jumlahnya tidak mencolok,"lanjut Bestian.

Menariknya lagi, dari sisi gender, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif kali ini yang paling besar, yaitu mencapai 18%. Pada 2004-2009, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif hanya 10,7%. Jumlah lebih kecil lagi terjadi pada 1999-2004 yang hanya 9,0%. Dilihat dari periode-periode sebelumnya, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif kali ini paling dahsyat.

Bahkan, Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut sebagai "blessing disguise" atau rahmat tak terduga. Melalui keputusan MK tentang mekanisme suara terbanyak, ternyata mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif lebih baik. "Ini sesungguhnya *blessing disguise*. Dengan sistem yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bahkan sempat ditolak oleh beberapa aktivis perempuan justru menghasilkan keterwakilan perempuan yang lebih baik," kata Hidayat. (Rini S. Danudjaja)

MPR Harus Melakukan Sosialisasi Internal

Jurnal MPR (1/10). Abdul Hakim, anggota MPR dari PKS menilai MPR periode 2009-2014 harus lebih meningkatkan partisipasi aktif para anggota MPR di kelompok anggota DPR.

"Memang peranan MPR sesuai UUD hanya disebutkan dalam rangka sosialisasi terhadap UUD 1945," terang Abdul Hakim mengenai MPR ke depan seusai Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 2004-2009 di Gedung Nusantara, Selasa (29/9).

Menurut Dia, para anggota MPR juga harus melakukan sosialisasi ke dalam (internal), khususnya mengenai pemahaman terhadap UUD NRI Tahun 1945. "Perlu dilakukan sosialisasi internal secara masif bagi anggota MPR mendatang," tegasnya.

Laporan Ketua MPR, menurut Abdul Hakim, belum terlihat adanya laporan sosialisasi internal bagi anggota MPR. "Laporan sosialisasi UUD, khususnya bagi internal anggota MPR masih sedikit kegiatannya," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, hampir mayoritas anggota MPR/DPR atau sebesar 60% merupakan muka baru. Oleh karenanya sangat mendesak apabila MPR segera melakukan sosialisasi internal secara masif. "Jadi, anggota yang sekarang tidak semuanya terlibat saat amandemen UUD yang lalu," kata Abdul Hakim.

Mengenai jumlah pimpinan MPR yang dinilainya masih terlalu banyak dan cenderung boros anggaran. Seharusnya jumlah pimpinan MPR dikurangi, jika ingin melakukan efisiensi. "PKS dahulu menawarkan seperti itu, namun akhirnya UU-nya telah selesai dibahas dengan komposisinya tersebut," katanya.

Review sistem ketatanegaraan.

Anggota MPR (F-PG) Marwah Daud Ibrahim mengatakan, perlu adanya *review* ulang sistem ketatanegaraan, karena sistem kita masih menggunakan *hybrid system*. "Apabila kita ingin memosisikan sebagai oposisi maka sistemnya harus parlementer, sementara kalau presidensial tidak ada veto terhadap presiden," paparnya.

Terkait peran DPD kedepannya, Marwah menilai, DPD merupakan representasi wilayah yang terkait dengan peran otonomi daerah. Karena itu, segala persoalan dan pengembangan tentang daerah dapat diangkat ke pusat. "Saya berharap dengan otonomi daerah kondisi real di masyarakat dapat terangkat," katanya.

Marwah menilai, MPR telah banyak perubahan secara ketatanegaraan. Misalnya pada zaman Soeharto, MPR memiliki kekuasaan besar karena sebagai lembaga tertinggi negara. Pada masa Gus Dur, MPR memiliki peran melengserkan Gus Dur dan mengangkat Megawati. "MPR masih memiliki peran besar saat itu," paparnya. Tapi, di era reformasi MPR berubah secara konstitusional dari lembaga tertinggi menjadi hanya lembaga negara.(sugeng)

Primus Yustisio:
Jadi Anggota DPR Bukan Anugrah, Tapi Musibah

Jurnal MPR (1/10). Terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bagi publik figur sekelas Primus Yustisiono rupanya bukan anugerah, melainkan suatu musibah. Ia membayangkan bagaimana beratnya memikul amanah yang telah diberikan oleh rakyat yang memilihnya.

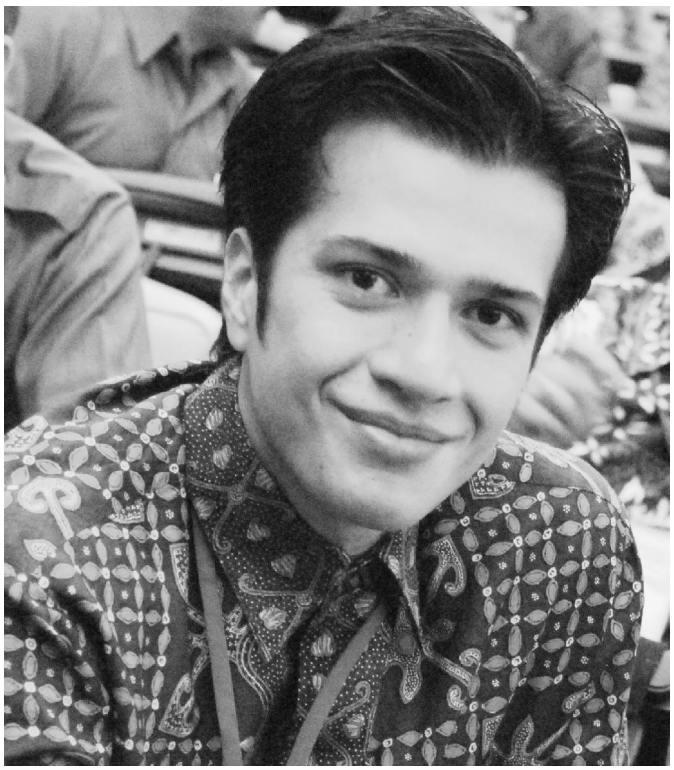

"Amanah ini harus saya pertanggung jawabkan sebaik-baiknya, dan amanah ini merupakan cobaan buat saya untuk bisa berkerja lebih baik demi rakyat," katanya saat menghadiri Gladi Resik Pelantikan Calon Anggota DPR/ MPR/DPD Periode 2009-20014 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/9).

Bentuk tanggung jawab sebagai anggota dewan, menurut politisi dari PAN, ada dalam banyak hal, seperti bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meski demikian ia berusaha mensyukuri musibah ini dan akan berusaha sebaik-baiknya.

Ketika ditanya mengenai kesiapannya dirinya menjadi wakil rakyat, Primus yang juga suami dari artis Jihan Pahira ini menegaskan, ia sengaja menyempatkan mempelajari ilmu ketatanegaran serta seluk beluk DPR/MPR, "Hal ini dapat membuat gambaran pada diri saya mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat di DPR," jelasnya.

Mengenai masa orientasi yang diberikan KPU kepada calon anggota DPR, MPR, dan anggota DPD, Primus menerangkan, penyelenggaran orientasi kurang berjalan maksimal, seperti banyaknya pembicara atau narasumber yang terwakilkan, namun hal tersebut tidak berdampak besar karena sebelumnya partainya pun telah memberikan pembekalan sebagai calon anggota DPR.

Terkait banyaknya penilaian yang menyimpulkan bahwa orientasi terhadap Anggota DPR merupakan pemborosan, ia menyatakan setuju-setuju saja. Terlebih partainya telah melakukan pembekalan tersebut mulai dari anggota DPRD tingkat II hingga untuk anggota DPR RI

Pesinetron dan bintang iklan ini sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Subang, namun gagal. Namun karena ketertarikannya pada dunia politik, ia akhirnya maju menjadi calon legislatif dari PAN mewakili daerah Subang, Majalengka dan Sumedang. Kini status sebagai politisi telah disandangnya dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat. (nt/sw).

Tantowi Yahya
Anggap Buah Perjuangan

Jurnal MPR (30/09). Tokoh serba bisa Tantowi Yahya masuk sebagai anggota MPR dari unsur DPR RI dari Partai Golkar. Artis yang sangat gandrung musik country ini menyatakan keharuannya terpilih menjadi anggota MPR/ DPR RI periode 2009-2014. Perjuangannya selama ini dengan menyambangi daerah pemilihannya selama tujuh bulan lebih akhirnya berbuah manis dengan masuk ke Senayan.

"Saya terharu, terutama pada saat detik detik pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 01 Oktoner nanti, ya saya akan membawa amanah ini seperti janji saya sewaktu kampanye kepada para pemilih saya dan secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Tantowi.

Mengenai komentar miring terhadap para anggota MPR/ DPR dari kalangan artis yang disebut hanya menjadi pajangan dan pemanis saja, Tantowi tidak kecewa. "Saya tidak kecewa dan marah. Saya akan buktikan nanti kalau saya akan bekerja jauh lebih baik untuk bangsa."(Derry Irawan)

Marzuki Alie
Sosok Pekerja Keras Bagi Masyarakat

Jurnal MPR (1/10). Perjalanan Marzuki Alie menuju kursi Ketua DPR dari Partai Demokrat tampaknya akan berjalan mulus. Sebagai calon dari partai pemenang pemilu, pria kelahiran Palembang, 6 November 1955, ini merupakan satu-satunya calon yang diajukan oleh partainya untuk menduduki jabatan di lembaga negara yang bergensi itu.

Marzuki dikenal sebagai sosok yang aktif bersosialisasi, pekerja keras dan ramah. Ia memulai karirnya sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan di DKI Jakarta (1975-1980), untuk kemudian ditugaskan ke tanah kelahirannya, Palembang atau tepatnya di Kantor Perbendaraan Negara Depkeu Palembang (1979-1980)

Dia juga berkecimpung di berbagai aktifitas sosial, seperti di bidang pendidikan, keagamaan, politik dan kemasyarakatan lainnya. Sebagai politisi, ia sangat loyal terhadap Partai Demokrat. Marzuki termasuk tim sukses pemenangan pasangan SBY-JK pada Pemilu 2004.

Kariernya di bidang politik juga tidak diragukan lagi. Ayah dua anak ini juga pernah menjabat Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumsel (2003-2004). Karena keberhasilannya mendulang suara Partai Demokrat di Provinsi Sumsel, Marzuki dipercaya menjadi fungsionaris DPP PD (2004-2005) hingga menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PD (2005-2010).

Tangan dingin dan kerja keras Marzuki bersama Partai Demokrat Provinsi Sumsel dalam memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 membuahkan hasil manis. Pasangan SBY-Boediono di Bumi Sriwijaya itu berhasil meraih 54,07% suara, mengalahkan pasangan lainnya.

Keinginannya untuk terus belajar dan menggali ilmu mendorong dirinya untuk melanjutkan pendidikan di program doktor (Ph.D). Saat ini, dia tercatat sebagai kandidat Ph.D di Universiti Utara Malaysia.

Marzuki juga mendedikasikan dirinya menjadi pengajar di LB PAAP-Fakultas Ekonomi Unsri (1984-1989) dan menjadi pembicara di berbagai forum-forum akademisi, seperti Pelatihan Manajemen UKM (1996 – 1999) dan Kurikulum Berbasis Komp. KOPERTIS WIL II (2002), dan menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Palembang (2002 – 2006).

Di waktu senggang, Marzuki menyempatkan diri memberikan materi kuliah umum di Universitas IGM, dan sebagai narasumber di berbagai seminar pemuda dan pelatihan Political Marketing, Ketua Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri, Penanggung Jawab KBIH IGM – Al Ihsaniah serta anggota Dewan Pembina DPC KKP Kota Palembang.

Perkembangan teknologi informatika juga tidak luput dari perhatian Marzuki, hingga ia dipercaya menjadi Ketua Forum Komunikasi Ahli Komputer BUMN Semen Indonesia (1992- 1996).

Dia juga aktif di Asosiasi Semen Indonesia dan memegang jabatan Ketua Umum Serikat Karyawan PT.Semen Baturaja (1998– 2001). Selain itu, ia juga anggota Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia (1998 – 2001), anggota Dewan Pembina Ormas DPP Suara Bangsa (2003 – 2005), anggota Dewan Pembina Ormas DPP AMDI (2003 – 2005) dan ketua WANBIN Forum Pemuda Keadilan Pusat (2003–2005).

Prestasi yang membanggakan ketika ia berhasil menyelamatkan perusahaan Semen Baturaja. Saat itu, 1999, Marzuki diangkat menjadi Direktur PT Semen Baturaja, justru di saat kondisi perusahaan itu sudah hancur lebur dan bahkan dinyatakan bangkrut akibat krisis moneter 1997-2000. Tapi, dengan kesabaran, dia bersama anggota Direksi lain berhasil melakukan restrukturisasi kredit bermasalah TSB di BPPN, senilai Rp 488 miliar melalui *cash settlement* dengan KI Perbankan tahun 2000, sekaligus menyelamatkan PT Semen Baturaja dari kebangkrutan tanpa bantuan Pemerintah. Nilai aset hasil penilaian dari "*Independen Appraisal Company*" tahun 2001 sebesar Rp 1,2 trilliun.

Bangun Citra DPR

Ketika ditanya mengenai pencalonan dirinya menjadi Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyatakan, akan berusaha membangun citra lembaga legislatif menjadi lebih baik dari periode 2004-2009. "Kekurangan masa lalu akan kami perbaiki,"ujar Marzuki disela-sela acara Gladi Resik upacara Pelantikan Anggota DPR/MPR Periode 2009-2014 di Gedung Nusantara, Senayan (30/9).

Menurut Marzuki, kepemimpinan DPR mendatang bertekad akan memaksimalkan dan meneruskan pencapaian positif periode sebelumnya. "Untuk melakukan pembaruan harus dilakukan secara bersama-sama, karena pimpinan DPR merupakan jabatan kolektif," katanya.

Ketika ditanya mengenai kasus hukum yang pernah dialami Marzuki, dia menegaskan bahwa kasus itu sudah tuntas dan tidak ada masalah lagi. "Jadi kenapa harus dituduhkan, padahal saya telah menyelamatkan aset negara Rp 1,2 triliun," tegasnya. (sugeng)

Kesibukan Siti Nurbaya Bakar

Jurnal MPR (1/10). Persiapan pelantikan anggota dan ketua DPD menyita waktu sekjen DPD Ibu Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar M.Sc dan staf. Sejak hari Sabtu, 26 September, staf sekretariat disibukkan dengan kedatangan para anggota DPD yang *chek in* di Hotel Sultan. Malam harinya dilanjutkan dengan pembukaan orientasi II calon terpilih anggota DPD RI periode 2009-2014.

Pada hari Ahad pun, kesibukan tidak berkurang. Sebab, pada Ahad (27/09) sekretariat disibukkan oleh ibadah, kemudian kegiatan internal propinsi/ pendalaman materi/pengajuan nama anggota komisi kepada panitia pengarah. Lalu, pada hari Senin (28/ 09) setelah sidang paripurna anggota DPR periode 2009-2014 di Gedung Nusantara V, para anggota kembali ke Hotel Sultan. Malam harinya kemudian diadakan silaturahmi oleh para anggota DPD periode 2004-2009 dan calon terpilih anggota DPD RI periode 2009-2014.

Dan pada hari Rabu (30/09) diadakan gladi bersih oleh seluruh anggota DPR dan DPD anggota periode 2009-2014. Usai gladi bersih Ibu sekjen berangkat ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendengar putusan dari MK soal pemilihan ketua MPR.

Selama persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPD dan pimpinannya, kendaraan milik sekretariat yang biasa digunakan untuk antar jemput karyawan pun untuk sementara digunakan untuk antar jemput anggota DPD terpilih periode 2009-2014. Jadwal-jadwal yang padat menyebabkan Sekjen dan staf harus rela pulang larut malam.(Iman Firdaus)

Jubah Putih Asep Mauzul

Jurnal MPR (1/10). Pada acara gladi resik yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Rabu (30/09) untuk persiapan pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR yang baru, tampak seorang wakil rakyat yang berpenampilan beda. Tidak seperti yang lain, mengenakan jas atau batik. Tokoh satu ini justru mengenakan baju gamis putih, serban penutup kepala putih, dan berjas.

Perawakannya yang kecil serta menggunakan kacamata membuat Asep Mauzul menjadi perhatian sekitar 690 calon anggota MPR. Asep adalah anggota MPR dari unsur DPR mewakili daerah pemilihan Tasikmalaya, Jawa Barat. Asep masuk Senayan melalui pintu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketika didekati dan diberi ucapan selamat, Asep hanya tersenyum tersipu dan kagok. Tapi, dari penampilannya, Asep menikmati busana yang telah menjadi pakaian keseharian ini. Asep juga terlihat sibuk. Di sela-sela jedah gladi bersih, ia terus disibukkan dengan telepon selulernya. (Iman Firdaus)

Anjungan Niaga Ramai Dikunjungi

Jurnal MPR (1/10). Selama proses persidangan di Gedung MPR/DPR beberapa anjungan produk seperti Telkom Speedy, air minum kesehatan Hexagonal, Mustika Ratu, Air Mancur, Kopi Torabika dan Stand Dharmawanita Persatuan Setjend DPR RI menjadi hiburan sendiri.

Anjungan Setjen DPR RI yang menyediakan macam-macam pakaian dan souvenir itu juga cukup ramai dikunjungi. Puncak ramai anjungan dari serbuan pengunjung sidang pada hari Selasa (29/ 09) lalu karena masih ada stand produk jamu Mustika Ratu dan Jamu Air Mancur.

Entah karena penat dan capek mengikuti sidang atau karena memang ingin sehat dua anjungan produk jamu ini paling ramai, malah terlihat banyak pula anggota MPR dari berbagai unsur menikmati racikan jamu dari dua merek terkenal ini.

Hari Rabu (30/09) kemarin, anjungan yang paling banyak dikunjungi adalah stand Dharmawanita Persatuan Setjend DPR RI terutama kalangan wanita. Kenapa? Karena di sana tersedia macam-macam model pakaian dan souvenir untuk kenangan.

Lalu bagaimana dengan kaum laki-lakinya, sudah pasti mereka menyerbu stand Kopi Torabika yang letaknya sebelah persis dengan stand Dharmawanita Persatuan ini.

Menurut Fitri, penjaga anjungan kopi Torabika, mengaku hingga Rabu malam tadi laku 250 saset kopi. Menurut gadis berkacamata ini, yang paling laku jenis Kapucino dan kopi susu yang dijual masing-masing Rp 5.000. Untuk kopi hitam dibandrol Rp 3.000.

Yang pasti keberadaan anjungan-anjungan ini sedikit banyak membantu pengunjung dan anggota sidang mendapatkan oasis kepenatan selama rutinitas persidangan. Para penjaga anjungan pun terlihat cukup aktif, atraktif dan *friendly* dalam melayani permintaan produk dan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut produk mereka yang datang silih berganti. Dan yang pasti, sedikit banyak ada suguhan gratis dari beberapa anjungan produk ini. (Derry Irawan)

Ajak Anak Istri Gladi Bersih

Jurnal MPR (1/10). Dukungan keluarga terhadap para calon anggota MPR periode 2009-2014 terlihat saat mereka melakukan gladi bersih di Gedung Nusantara V, Rabu (30/09) kemarin.

Momen-momen penting saat calon anggota MPR duduk untuk pertama kali di ruang Paripurna walaupun cuma hanya gladi bersih tak disia-siakan oleh seorang anak untuk terus membidik ayahnya dengan kamera digital yang selalu di tentengnya.

"Ayo, papa lihat kesini dong..ya gitu..satu dua tiga," kata si anak. Sang ayah pun langsung berpose kearah lensa kamera anaknya. Disisi lain terlihat istri seorang calon anggota MPR yang sangat sibuk membetulkan lipatan dasi suaminya. Padahal, tak terjadi sesuatu dengan dasinya. Mungkin saking bangganya dengan pujaannya yang kini menjadi tokoh elite bangsa.

Di tempat yang lain malah ada seorang calon anggota MPR yang memboyong seluruh keluarganya, baik istri dan anak-anaknya ke gedung yang akan menjadi kantor tetap sang ayah. Momen-momen ini memang sangat indah. Tapi, keluarga nanti juga harus mengingatkan sumpah dan janji yang akan disampaikan hari Kamis (1/10) ini.(Derry Irawan)

Pameran Foto Kinerja MPR

Jurnal MPR (1/10). Ada suasana lain ketika berada di lantai 1 Gedung Nusantara III, MPR RI Senayan Jakarta. Tidak hanya munculnya beberapa anjungan yang semakin banyak, tetapi juga ada deretan foto-foto menarik tentang kinerja MPR periode 2004-2009.

Memang foto-foto ini dipajang dalam rangka sidang umum MPR tahun ini. Pameran yang bertajuk Pameran Foto Kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini merupakan kerjasama MPR dan Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Pameran akan berlangsung selama sidang.

Pameran ini mengetengahkan berbagai kegiatan yang dilakukan selama masa bakti 2004 2009 hasil jepretan para fotografer. Tampak ada beberapa foto yang menarik, diantaranya foto kunjungan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, para ketua MPR yang menjenguk mantan ketua MPR (1971-1978) Dr. K.H. Idham Chalid, dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh MPR seperti sosialisasi UUD NRI 1945 di Radio Republik Indonesia maupun beberapa kegiatan lainnya. (Nurul Huda)

Di Senayan Bertebaran Bintang

Jurnal MPR (1/10). Gedung Nusantara yang biasanya sunyi senyap, pagi itu mendadak bertebaran bintang. Saat itu, akan dilaksanakan gladi bersih Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR dan DPD RI, jadi tak heran jika seluruh anggota yang akan dilantik menyerbu gedung bulat yang menjadi simbol kebanggaan gedung MPR/DPR RI.

Satu per satu anggota yang akan mengikuti jalannya gladi bersih memasuki ruang paripurna. Suasana tampak ramai, diiringi gelak tawa tanda suka cita sebagai anggota yang telah terpilih menjadi anggota MPR/DPR periode 2009 – 2014.

Dari beberapa yang hadir, tampak tokoh yang sudah dikenal seperti Marzuki Alie, dan juga di kalangan selebriti seperti Si Raja Minyak Ruhut Sitompul, Rike Diah Pitaloka alias "Oneng", Primus Yustisio, Eko Patrio dan Okki Asokawati. Tak ketinggalan juga pakar telematika Roy Suryo terlihat mencolok diantara anggota-anggota lainnya.

Bak madu yang dikelilingi lebah, itulah istilah yang paling tepat saat wartawan berlomba-lomba melakukan wawancara dengan Eko dan Primus. Ternyata, ke dua seleb ini cukup diminati para wartawan.

Tapi ternyata bukan hanya wartawan saja yang berlomba-lomba ingin mendekati para bintang itu. Anggota pun banyak yang ingin berfoto dengan aktor dan presenter kondang tersebut.

Mereka dengan enaknya foto di depan podium, di kursi yang mereka duduki dan bahkan sampai kesudut-sudut ruangan Nusantara. Apalagi bagi anggota yang datang dari daerah, yang memang belum pernah masuk di gedung MPR/DPR RI. Ini tentunya menjadi pengalaman baru. Momen ini mungkin menjadi *event* penting bagi mereka, apalagi untuk jadi anggota sekarang sangat sulit, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Jadi, mereka itu betul-betul pilihan rakyat.

Artis-artis kita pun meladeni dengan senang hati, berfoto di sana, berfoto di sini, seperti dia sedang dikerumuni penggemar-penggemarnya.

Tapi ternyata...beberapa anggota itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga menyerbu Roy Suryo sang pakar TI. Saat itu Roy mendadak didaulat menjadi seleb. Para anggota, khususnya wanita, minta diabadikan dengan anggota dari Partai Demokrat itu.

Roy pun tersenyum bangga dikerumuni para legislatif cantik itu. Dalam benaknya mungkin dia berpikir: wah ternyata nggak kalah terkenalnya ya saya dengan Primus atau Eko, buktinya banyak juga yang mau berfoto-foto dengan saya.

Tak heran jika Roy cukup terkenal, karena saat mengomentari hal-hal yang berbau teknologi canggih dialah memang jagonya.(Tuti)

Busana Fashion dan Foto Ria

Jurnal MPR (1/10). Sidang Paripurna MPR RI Masa Akhir Jabatan 2004-2009 digelar. Banyak ragam polah yang diperlihatkan sebagian para anggota MPR RI. Tampak seorang anggota yang datang dan menduduki ruang sidang dengan dandanan yang sangat *fashionable*, entah karena mereka tahu dalam persidangan akbar itu puluhan pewarta foto dan video dari berbagai media massa nasional berkerumun di setiap sudut gedung dan ruang sidang, sehingga mereka perlu mempersiapkan diri di depan mereka.

Sejak dari luar ruang sidang sampai masuk dalam persidangan bermacam-macam gaya dan model

pakaian di pertontonkan bak ajang perhelatan fashion. Beberapa wartawan, petugas dalam gedung dan petugas keamanan persidangan beberapa kali berdecak kagum melihat dandanan, gaya pakaian yang sangat bagus-bagus dan terlihat necis, gagah dan cantik dari beberapa anggota MPR dan istri-istri mereka.

Tetapi ada satu gaya pakaian salah satu anggota wanita MPR yang terkesan agak berlebihan, pakaian dan dandanannya agak biasa tetapi dalam persidangan dia memakai topi yang biasa dipakai ABG gaul. Entah, mungkin dianggap sidang terakhir, beberapa anggota MPR pada saat berlangsungnya pembacaan pidato Ketua MPR RI terlihat asyik saling bergantian foto dalam ruang sidang. Seperti biasa, di deretan kursi bagian belakang beberapa anggota MPR juga terlihat asyik mengobrol, SMS-an, Ber-HP ria, dan ada juga yang tertidur.

Tetapi dari berbagai kelakukan aneh, nyeleneh bin ajaib yang diperlihatkan sebagian anggota MPR itu, ada juga ulah anggota MPR yang patut diacungi jempol. Mereka mendengar pidato dan memgikuti dengan seksama. Mereka berdandan sederhana dan memakai pakaian adat Indonesia, sehingga terlihat atmosfir kebudayaan Indonesia terpancar dari suasana sidang itu.(Derry Irawan)

Stand Mustika Ratu & Air Mancur Diserbu Penggemar Jamu

Jurnal MPR (1/10). Selesai Sidang Paripurna MPR RI, banyak anggota MPR dan pengunjung sidang menyerbu stand jamu Mustika Ratu dan Air Mancur. Memang selama proses persidangan di Gedung MPR/DPR terdapat stand-stand produk seperti Telkom Speedy, Air minum kesehatan Hexagonal dan yang paling ramai disambangi pengunjung ya ini... stand jamu Mustika Ratu dan Air Mancur.

Apakah karena begitu capek dan pegalnya mengikuti jadwal acara sidang sampai banyak pengunjung bahkan dari anggota MPR juga yang memadati dua stand jamu ini. Yang pasti keberadaan stand-stand produk ini sedikit banyak membantu pengunjung dan anggota sidang mendapatkan oasis kepenatan selama rutinitas persidangan.

Selain dua stand produk jamu ini, beberapa stand produk lainnya yaitu Telkon Speedy dan Air Minum kesehatan Hexagonal pun terlihat cukup aktif, atraktif dan *friendly* dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan baik yang serius maupun yang hanya ingin ngobrol dari para pengunjung yang datang ke *boot stand* produk mereka. Dan yang pasti sedikit banyak ada suguhan gratis dari beberapa stand, dan kalau bisa jangan mengharapkan yang gratis saja. Rogoh kantung belilah produk Indonesia.(Derry Irawan)

Hampir Seribu Wartawan Liput Pelantikan Anggota MPR

Jurnal MPR (1/10). Pelantikan Anggota MPR RI Periode 2009-2014 ternyata diliput oleh kurang sedikit dari seribu orang wartawan, baik dari media cetak mau pun elektronik. Berdasarkan rekapitulasi terakhir dari Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar-lembaga MPR, tercatat 909 peliput dari 96 media, dalam dan luar negeri, yang akan meliput sidang pelantikan anggota MPR yang baru.

Saking banyaknya wartawan yang ingin mendapatkan tanda pengenal peliputan, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga MPR pun kewalahan. Terjadi antrian yang cukup panjang di lantai 5 Gedung Nusantara III, tempat pengambilan tanda pengenal tersebut. Inggried Dwi Wedhaswary, wartawan *www.kompas.com*, misalnya, merasa sedikit jengkel karena harus antri. "Seperti antri BLT saja," kata Inge Tirta, wartawan *Majalah Tirai.*

Tapi, itu tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak MPR, karena ada juga wartawan atau media yang mendaftar pada saat-saat terakhir. Kasubag Pemberitaan Biro Humas MPR Rharas Esthining Palupi bisa memahami keluhan dari rekan-rekan wartawan itu. Harus dimaklumi bahwa pihak MPR, menurut Rharas, sudah jauh hari mencetak tanda pengenal yang diperlukan, namun karena acara pelantikan ditangani oleh KPU maka semua tanda pengenal, termasuk untuk pers, dibuat oleh KPU. Dan tanda pengenal itu baru diserahkan ke pihak MPR menjelang hari H.

Akibatnya, bagian Pemberitaan dan Hulembaga harus merekap kembali nama-nama wartawan dan media yang sudah ada hingga larut malam. Belum lagi menyediakan materi lainnya. Antrian panjang terjadi disebabkan karena pengambilan tanda pengenal baru dibuka pada jam 17.00 kemarin dan selanjutnya tidak melayani pendaftaran dan pengambilan tanda pengenal. Tapi, antrian hanya berlangsung satu jam.

Selain itu, juga terdapat kendala yang datang dari si wartawan itu sendiri. Banyak wartawan yang identitas dan fotonya tidak sesuai. "Bahkan di *last minutes*, mereka masih ada yang ingin meminta tambahan jatah peliputan di luar yang sudah terdaftar," ujarnya.

Kendala lain, jumlah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh KPU sangat terbatas, selain itu perlu diantisipasi membludaknya jumlah wartawan yang akan mengambil gambar dari balkon. Seperti diketahui, kapasitas dan kemampuan balkon, baik itu sebelah kiri atau kanan, tidak akan mampu menampung wartawan yang begitu banyak.

Akhirnya, Rharas atas nama petugas yang yang melayani kebutuhan kartu pengenal peliputan Sidang MPR mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.(Ardi Winangun)

Roy Suryo
Lakukan Interupsi Perdana

Jurnal MPR (1/10). Belum juga dilantik menjadi anggota MPR/DPR RI, salah seorang anggota dari Fraksi Partai Demokrat telah melakukan interupsi. Interupsi ini merupakan interupsi perdana yang dilakukan seorang anggota sebelum mereka dilantik.

Nama Roy Suryo, calon anggota MPR/DPR dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Sebelumnya, Roy terkenal sebagai pakar Telematika.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI sudah menjadi pemandangan biasa jika seorang anggota melakukan interupsi. Mungkin, kemampuan interupsi ini perlu dimiliki bagi setiap anggota parlemen.

Kemampuan ini juga dilakukan Roy Suryo saat pelaksanaan gladi bersih Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota MPR/DPR dan DPD RI. Saat itu, gladi bersih berlangsung sebanyak dua kali. Gladi bersih pertama dihadiri Presiden dan Wakil Presiden yang diperagakan oleh pegawai Sekjen DPR, dan gladi bersih ke dua tanpa dihadiri Presiden.

Di saat gladi akan dimulai, Roy yang duduk di baris ke tiga dari depan mendadak berdiri dan berkata dengan lantang, "Interupsi pimpinan, kenapa kursi Presiden kosong, dan tidak ada peraga presiden yang duduk di situ, ini tidak boleh terjadi. Peraga presiden harus ada, kalau tidak harus bertanggung jawab bila terjadi kesalahan. Gladi bersih tidak boleh salah," ujarnya mantap

Interupsi ini spontan mendapat sambutan meriah dari sesama anggota baru DPR. Tepuk tangan meriah seketika membahana dalam Gedung Nusantara, tempat berlangsungnya acara gladi bersih pelantikan.

Setelah gemuruh tepuk tangan dan segala kemeriahan itu mereda, maka dengan tenang Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh menjelaskan bahwa khusus gladi bersih yang ke dua itu tidak memerlukan adanya peraga Kepala Negara.

Skenario itu dibuat karena untuk mengantisipasi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat menghadiri acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR dan DPD RI.

"Tadi kita sudah melaksanakan gladi bersih pertama yang dihadiri Presiden RI dan ada peraga presidennya. Sekarang kita mencoba gladi bila Presiden RI tidak hadir, jadi tidak ada peraga presidennya," jelasnya.

Mendengar penjelasan ini, gemuruhlah tawa hadirin memenuhi seisi ruangan. Sementara Roy Suryo hanya mengganggukanggukan kepala dengan tersipu-sipu. Apakah Roy Suryo datang terlambat, sehingga dia tidak tahu jalannya gladi bersih pertama? Ternyata tidak, Roy Suryo datang ke ruangan itu tepat waktu, sebelum acara gladi bersih dimulai.

Wartawan yang sedang berkumpul pun memberikan komentar : Mas Roy..... Mas Roy, mau membuat *record* penginterupsi perdana, tapi sayangnya kok pada saat yang salah," kata salah seorang wartawan yang diiringi tawa teman-teman lainnya. (Tuti)